

Otoritas Privat WADA dalam Sanksi kepada Rusia dan Dampaknya bagi Formula 1 di Rusia

Ikhald Rizqy Al Raihan

Program Magister Hubungan Internasional

Universitas Airlangga

ikhald.rizqy.al-2022@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Makalah ini membahas bagaimana World Anti-Doping Agent (WADA) menjatuhkan sanksi kepada Rusia pada tahun 2019 yang berdampak kepada penyelenggaraan Formula 1 (F1) di Rusia. WADA menjatuhkan sanksi larangan bertanding kepada Rusia di kejuaraan internasional selama 4 (empat) tahun, yang kemudian diputuskan oleh the Court of Arbitration for Sport (CAS) menjadi 2 (dua) tahun, setelah Rusia mengajukan banding. Dampak dari sanksi tersebut bagi penyelenggaraan F1 adalah tidak adanya bendera Rusia selama penyelenggaraan GP Rusia tahun 2021 dan larangan penggunaan bendera Rusia bagi pembalap asal Rusia. Padahal, di tahun tersebut, seorang pembalap Rusia sedang berkompetisi di F1. Hasil dari penelitian ini adalah WADA mampu menunjukkan kemampuannya sebagai sektor privat dengan memberlakukan kode etik anti doping dan menjatuhkan sanksi kepada Rusia yang berusaha memanipulasi hasil laboratorium doping dari tes atlet yang positif doping.

Kata Kunci: Sektor Privat, WADA, Rusia, Formula 1, Pendadahan

Abstract

This paper discusses how the World Anti-Doping Agent (WADA) imposed sanctions on Russia in 2019 which impacted the implementation of Formula 1 (F1) in Russia. WADA sanctioned Russia's 4 (four) year ban from competing in international championships, which was later decided by the Court of Arbitration for Sport (CAS) to 2 (two) years, after Russia appealed. The impact of the sanctions on the implementation of F1 is the absence of a Russian flag during the 2021 Russian GP and a ban on the use of the Russian flag for Russian drivers. In fact, in that year, a Russian driver was competing in F1. The result of this study is that WADA was able to demonstrate its capabilities as a private sector by imposing an anti-doping code of

Otoritas Privat WADA Dalam Sanksi Kepada Rusia dan Dampaknya bagi Formula 1 di Rusia
conduct and imposing sanctions on Russia that seeks to manipulate doping lab results from doping-positive athletes' tests.

Keywords: Private Sector, WADA, Russia, Formula 1, Doping

1. Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan otoritas olahraga, negara harus siap untuk menaati regulasi oleh organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) agar mampu mengikuti kompetisi olahraga secara utuh. Keikutsertaan negara dalam kompetisi olahraga tersebut dapat dilihat sebagai upaya menunjukkan identitas negara di kancah internasional. Adapun pelanggaran terhadap kepatuhan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi dalam bentuk yang bertahap, mulai dari pelarangan penggunaan atribut negara sampai pencoretan atlet atau tim olahraga. Salah satu kasus yang terjadi akibat ketidakpatuhan negara terhadap institusi NGO adalah ketika the Court of Arbitration for Sport (CAS) menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas ketidakpatuhan kepada World Anti Doping Code (WADC). Sanksi tersebut berupa larangan bagi Rusia untuk mencalonkan diri dalam Olimpiade, Paralimpiade, atau segala kejuaraan olahraga internasional yang berlabel *World Championship*, larangan bagi perwakilan Rusia untuk menjadi perwakilan institusi olahraga manapun, dan larangan bagi atlet yang lolos tes doping untuk menggunakan atribut berupa bendera Rusia di seragam, atau kewajiban untuk mengatasnamakan diri sebagai “atlet netral” dalam partisipasi setiap perlombaan.

Konsekuensi tersebut merambah kepada Formula 1 (F1). F1 merupakan salah satu kejuaraan dunia balap mobil yang diselenggarakan Federation Internationale de l'Automobile (FIA), yang merupakan salah satu *signatory* WADC (WADA, t.t.-a). F1 pun akhirnya menaati regulasi yang sama, dengan melarang penggunaan bendera Rusia untuk pembalap dan penyelenggara GP Rusia yang masih berlangsung pada 2021. Pada tahun itu pula, terdapat salah satu pembalap F1 asal Rusia, yakni Nikita Mazepin yang membalap untuk tim Haas. Nikita Mazepin pun bertanding dengan membawa bendera Russian Automobile Federation (RAF) akibat sanksi tersebut. Sementara itu, penyelenggaraan GP Rusia di sirkuit Sochi Autodrom diselenggarakan tanpa bendera Rusia di publikasinya dan lagu kebangsaan Rusia tidak diperdengarkan di pembukaan GP.

World Anti Doping Agency (WADA) sebagai NGO yang mengatur dan mempromosikan larangan penggunaan doping dalam olahraga memiliki otoritas untuk mengatur agar larangan

tersebut berlaku efektif. WADA membuat WADC selaku kode etik dan mendorong negara-negara dan organisasi olahraga untuk mematuhi WADC agar mendapatkan status sebagai penandatangan sehingga mampu mengikutsertakan atletnya di dalam event olahraga internasional. Hal ini cukup unik untuk dianalisis mengingat status WADA sebagai NGO dapat memaksakan kepentingannya kepada negara demi terlaksana misi anti dopingnya.

Karena keunikan tersebut, artikel ini membahas lebih lanjut otoritas yang dimiliki oleh WADA dalam menjalankan misi anti dopingnya serta sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap WADC kepada Rusia, khususnya dalam F1. Penulis akan membahas secara khusus kepada konsekuensi yang harus dijalani oleh Rusia dalam F1 karena terdapat pembalap Rusia yang berkompetisi di F1 pada saat sanksi berlaku, mengingat Rusia bukanlah negara dengan budaya kompetisi di F1 yang besar jika dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi Rusia; pada momen pembalap mereka dapat berkompetisi, mereka sedang menjalani sanksi sehingga peserta dari negaranya tidak mampu mewakili negaranya secara penuh.

Artikel ini membahas bagaimana WADA dapat menjatuhkan sanksi kepada Rusia sehingga berdampak kepada keikutsertaan Rusia di F1. Pada sub-pembahasan pertama, penulis akan membahas otoritas WADA sebagai NGO dalam memberlakukan WADC. Kemudian, penulis akan melanjutkan pembahasan bagaimana WADA dapat menjatuhkan sanksi bagi Rusia. Pada pembahasan ketiga, penulis akan mendiskusikan dinamika Rusia di ajang F1. Terakhir, pembahasan akan mengerucut kepada efek sanksi tersebut kepada keterlibatan Rusia di F1.

2. Pembahasan

2.1. Nation Branding dalam Diplomasi Olahraga

Diplomasi olahraga merupakan salah satu model diplomasi yang menggunakan olahraga sebagai instrumennya. Diplomasi olahraga merupakan strategi diplomasi yang digunakan secara disengaja oleh atlet dan negara maupun aktor non-negara melalui penyelenggaraan olahraga untuk menarik, menginformasikan, dan membentuk citra yang baik di antara kebijakan luar negeri, dalam rangka untuk membentuk persepsi yang lebih kondusif untuk mengirimkan tujuan-tujuan organisasi penyelenggara (Murray, 2018, hlm. 3). Penggunaan olahraga sebagai alat diplomasi oleh aktor-aktor HI dapat berupa penyelenggaraan agenda olahraga atau pengelolaan olahraga internasional. Diplomasi model pertama pada umumnya dilakukan oleh negara, sedangkan model kedua dilaksanakan oleh organisasi olahraga internasional seperti FIA . Keberadaan olahraga skala internasional memungkinkan negara

untuk menunjukkan berbagai tipe superioritasnya, melalui keterampilan para atletnya hingga menunjukkan sistem ideologi negara (Murray & Pigman, 2014, hlm. 3). Sebagai contoh, Uni Soviet menggunakan olahraga sebagai instrumen diplomasi di masa Perang Dingin, di samping misi luar angkasa, untuk mengampanyekan nilai yang disebut “jalan hidup Soviet” kepada masyarakat internasional (Allison & Monnington, 2005, hlm. 11). Diplomasi olahraga modern memberikan keuntungan bagi negara menurut Stuart Murray, dosen diplomasi olahraga dari Universitas Bond, Australia, dan Geoffrey Allen Pigman, dosen diplomasi dari Universitas Birmingham, Inggris (2014, hlm. 5–6), yakni:

1. Diplomasi olahraga sebagai lingkungan diplomatik modern mendorong institusi diplomasi tradisional untuk bereformasi, beradaptasi, dan menguji diplomasi mereka;
2. Olahraga dan pelakunya dapat menyuarakan diplomasi negara;
3. Event olahraga akbar dapat menawarkan peluang diplomasi publik yang signifikan;
4. Olahraga dan diplomasi menawarkan kesesuaian antara keduanya. Diplomasi mewakili perdamaian dan memanifestasikan masyarakat internasional yang tertib dan beradab, olahraga menjadi sarana pertukaran internasional yang damai.

Sedangkan, *nation branding* menurut Ying Fan, dosen senior bidang *branding* dan komunikasi pemasaran dari *Brunel Business School, Brunel University in London* merupakan cara untuk mengaplikasikan strategi komunikasi pemasaran dan branding untuk mempromosikan citra negara (Szondi, 2008, hlm. 4). Negara dapat mempromosikan identitasnya berupa nama dan lambang negara, tempat-tempat menarik sebagai tujuan wisata, atau memanipulasi citranya untuk menghadapi lawan politiknya sebagai bentuk propaganda (Fan, 2006, hlm. 5–6). Kendati demikian, negara bukan menjadi aktor tunggal dalam *nation branding*. Negara dapat berperan sebagai inisiator dan koordinator *nation branding*, kemudian aktor lain seperti korporasi dapat mengeksekusinya dengan menunjukkan identitas negara untuk menunjukkan dari mana perusahaan tersebut berasal (Fan, 2006, hlm. 6; Szondi, 2008, hlm. 12).

Diplomasi olahraga memiliki keterkaitan dengan *nation branding*. Negara menggunakan olahraga sebagai alat politik yang salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan diri dan meningkatkan citra mereka, yang dapat berupa kesuksesan atau sekedar penerimaan (Allison & Monnington, 2005, hlm. 5). Peningkatan citra negara adalah salah satu tujuan proses *nation branding*. Negara mengadakan pesta olahraga akbar untuk meningkatkan *branding*-nya karena negara tuan rumah mendapatkan publisitas dan kesempatan untuk beriklan (Kobierecki &

Strožek, 2017, hlm. 701). Kedua peluang tersebut dibantu dengan perusahaan media yang menyiarkan olahraga kepada penonton dan menghubungkan antara atlet dengan penonton publik (Murray, 2018, hlm. 190). Tujuan *nation branding* melalui olahraga tidak selalu dilakukan dengan menyelenggarakan acara olahraga internasional. Negara-negara kecil juga mampu melakukan diplomasi olahraga, sekurang-kurangnya dengan berpartisipasi di ajang olahraga internasional. Partisipasi mereka juga dapat menunjukkan *nation branding* lewat pertunjukan bendera dan berdiri dalam parade atlet bersama atlet-atlet lain dari negara lebih maju (Kobierecki & Strožek, 2017, hlm. 701). Lebih lanjut, atlet berprestasi dalam olahraga dapat menjadi modal *nation branding* negara. Ini dipraktikkan oleh negara-negara Afrika pada dekade 1960-an dengan keunggulan atlet-atletnya di cabang olahraga atletik dalam Olimpiade (Allison & Monnington, 2005, hlm. 17). Michał Marcin Kobierecki, dosen politik internasional Universitas Lodz, Polandia, dan Piotr Strožek, dosen ekonomi Universitas Lodz, Polandia (2017, hlm. 702) menjelaskan 2 (dua) alasan mengapa kesuksesan atlet dapat berkaitan dengan *nation branding*: pertama, atlet pemenang kompetisi akan ditunjukkan dalam seremoni yang diliput media, sehingga meraih publisitas bagi dirinya dan negara yang dibela; kedua, kesuksesan dalam olahraga telah digunakan sebagai alat propaganda selama Perang Dingin sebagai bukti superioritas politik negara.

2.2. Otoritas Privat dalam Olahraga

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang biasanya kompetitif untuk melatih kebugaran fisik para pemain. Olahraga memiliki peraturan tentang jumlah pemain, perlengkapan yang digunakan, durasi permainan, dan peraturan disiplin lainnya. Tujuan dirancangnya peraturan tersebut agar pertandingan berjalan adil dan sportif. Peraturan dalam olahraga di level internasional telah diatur oleh organisasi internasional khusus di bidang olahraga (selanjutnya akan disebut federasi olahraga). Organisasi olahraga menurut Forster ini bertugas untuk merancang aturan hukum, mengawasi dan mengkoordinasikan pengembangan olahraga nasional dan global, pengembangan dan tata kelola atlet dalam olahraga, terlibat dalam arbitrase perselisihan, mengorganisasikan event dan kompetisi, dan menjaga hubungan dengan pemerintah, otoritas pengatur, perusahaan komersial, dan badan-badan afiliasi lain (Chatzigianni, 2017, hlm. 6).

Dengan perannya yang mengatur olahraga beserta unsur-unsurnya, dapat dikatakan bahwa federasi olahraga ini memiliki otoritas sebagai organisasi privat. Organisasi tersebut bekerja secara sukarela dan tidak di bawah kontrol pemerintah (*Non Governmental*

Organization/NGOs). Sektor swasta dapat bertindak sebagai pembuat kebijakan, aturan hukum dan norma, pengatur agenda, yang sebelumnya dilakukan oleh negara (Hall & Biersteker, 2002, hlm. 4). Kehadiran NGO sebagai pengatur regulasi tentunya memerlukan legitimasi publik. Aturan-aturan yang telah dilegitimasi oleh publik akan membentuk rezim privat.

Otoritas privat dalam olahraga ini akan membuat fenomena baru dalam politik internasional. Otoritas privat dapat membuat negara patuh terhadap hukum dan norma sehingga negara mampu berkompetisi di dalam pertandingan olahraga. Ini merupakan salah satu dari fitur globalisasi yang dapat menggeser peran negara dari otoritas mutlak menjadi otoritas bersama di samping organisasi-organisasi internasional. Globalisasi menghadirkan adanya peran NGO yang dapat mengatur norma. Namun, otoritas privat dalam olahraga memiliki faktor pembeda di antara NGO lain, mereka beroperasi dalam lingkungan yang diakui oleh bersama, yang membedakannya dengan otoritas privat lain seperti organisasi lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Chatzigianni, 2017, hlm. 17). Apabila norma-norma lingkungan dan HAM dapat diperdebatkan oleh aktor lain, norma olahraga internasional dapat diterima oleh aktor lainnya karena peraturan dalam olahraga harus dipraktikkan dalam pertandingan secara merata, terlepas dari seberapa besar *power* negara peserta.

Federasi internasional dan organisasi olahraga juga mampu menjatuhkan sanksi kepada negara atas pelanggaran kode etik. Sanksi yang dijatuhkan tergantung kepada tingkat pelanggaran kode etik negara tersebut, dan setiap organisasi memiliki sanksi yang bervariasi. Sanksi tersebut mengikat atlet dan klub yang menjadi anggota federasi olahraga. Sebagai contoh, pemain sepakbola yang menjadi anggota suatu klub di Eropa, secara otomatis merupakan anggota Union of European Football Associations (UEFA) dan The Federation Internationale de Football Association (FIFA) (van Kleef, 2013, hlm. 24). Maka, sanksi federasi olahraga internasional terkait dapat dijatuhkan kepada atlet atau klub olahraga lokal. Akan tetapi, Rosmarijn van Kleef, *Commercial Counsel* di *International Olympic Committee* (IOC) (2013, hlm. 29) mengatakan bahwa sanksi yang berlaku terkadang dibatasi oleh hukum negara atau regulasi internal di asosiasi olahraga lokal. Secara internasional, sanksi dapat mengucilkan negara dari komersialisasi olahraga dan memberikan pandangan negatif kepadanya (Ningsih, 2022, hlm. 138). Padahal, negara saat ini menjadikan olahraga sebagai alat untuk menunjukkan citra negara melalui kesuksesan, retorika, dan praktik baik mereka dalam olahraga (Allison & Monnington, 2005, hlm. 10). Adanya sanksi dapat membatasi peran mereka dalam partisipasi olahraga, dan mencoreng nama baik negara karena mereka dianggap melakukan kecurangan.

2.3. WADA sebagai Otoritas Anti-Doping

WADA adalah organisasi olahraga yang berdiri pada tahun 1999 di Lausanne, Swiss. WADA berdiri sebagai tindak lanjut atas skandal doping yang terjadi di dunia balap sepeda (WADA, t.t.-c) Titik awal pendirian WADA bermula ketika the International Olympic Committee (IOC) membentuk the First World Conference on Doping in Sport untuk mengajak setiap elemen dalam olahraga untuk melawan praktik doping. Hasil penting dari konferensi tersebut adalah proposal pembentukan organisasi internasional anti-doping yang berdiri secara independen (Casini, 2009, hlm. 7). Maka, dari hasil konferensi tersebut, WADA berdiri sebagai NGO pada tanggal 10 November 1998.

Pengorganisasian WADA memiliki struktur organisasi yang keanggotaannya berasal dari perwakilan federasi-federasi olahraga dan perwakilan organisasi pemerintah. Lorenzo Casini, profesor Hukum Administrasi dari Universitas Roma (2009) menyebutnya sebagai *Global Hybrid Public-Private Bodies*. Kepengurusan WADA terdiri dari *Foundation Board* (disebut juga *the Board*), *Executive Committee* (ExCo), *Standing Committee*, *Expert Advisory Groups* (EAGs), *Nominations Committee*, dan *Independent Ethics Board*. *The Board* merupakan struktur tertinggi dalam WADA (WADA, t.t.-b), yang terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, perwakilan dari *Olympic Movements*, dan perwakilan dari otoritas negara. *Olympic Movements* merupakan sekumpulan federasi-federasi olahraga yang terafiliasi oleh IOC; seperti *Association of International Olympic Winter Sports Federations* (AIOWF), *Association of National Olympic Committees* (ANOC), *Association of Summer Olympic International Federations* (ASOIF), *Global Association of International Sports Federations* (GAISF), Dewan Atlet IOC, *International Paralympic Committee* (IPC) dan IOC sendiri. Keanggotaan otoritas publik di dalam *The Board* diwakili oleh representasi individu-individu yang menjadi pejabat publik bidang olahraga, dan dipilih di masing-masing regional.

WADA secara umum bertugas untuk mengatur dan mempromosikan gerakan anti-doping di dalam olahraga internasional. Dalam statutenya, WADA bertujuan untuk;

- (1) untuk mempromosikan dan mengkoordinasikan perang melawan doping dalam olahraga di tingkat internasional, di segala bentuknya termasuk melalui dalam dan di luar kompetisi;
- (2) memperkuat prinsip-prinsip etika untuk praktik bebas doping olahraga dan untuk membantu melindungi kesehatan para atlet di tingkat internasional;

- (3) mendirikan, mengadaptasi, memodifikasi, dan memperbarui bahan-bahan dan cara terlarang, berlaku untuk semua badan publik dan swasta yang bersangkutan dengan olahraga;
- (4) mendorong, mendukung, mengoordinasikan dan, bila perlu, melakukan kerja sama penuh dengan badan publik dan swasta yang bersangkutan;
- (5) mengembangkan, menyelaraskan dan menyatukan standar ilmiah, pengambilan sampel dan teknik serta prosedur yang berkaitan dengan analisis dan peralatan, termasuk homologasi laboratorium;
- (6) menetapkan dan mempromosikan aturan, prosedur disipliner, sanksi dan cara memerangi doping lainnya dalam olahraga secara selaras, dan berkontribusi pada penyatuannya, dengan mempertimbangkan memperhitungkan hak-hak para atlet;
- (7) merancang dan mengembangkan program pendidikan dan pencegahan anti-doping di level internasional, dalam rangka mempromosikan praktik olahraga bebas doping sesuai dengan prinsip etika, dan;
- (8) mempromosikan dan mengkoordinasikan penelitian dalam perang melawan doping dalam olahraga (Constitutive Instrument of Foundation of the Agence Mondiale Antidopage--World Anti-Doping Agency, 2021).

Penggunaan doping dalam olahraga merupakan fokus perhatian utama WADA. Pelarangan alat, bahan dan metode doping menjadi hal yang diperangi oleh WADA. Kayser dan Smith (dalam Ningsih, 2022, hlm. 132) berargumen bahwa pelarangan doping dalam olahraga terkait dalam dua faktor, yakni: (1) dari aspek medis, penggunaan doping dalam sisi medis dapat merusak kesehatan atlet. Apabila penggunaan doping dibiarkan di kalangan atlet, ditakutkan doping menjadi hal yang lumrah di masyarakat umum; (2) dari tujuan olahraga sendiri, penggunaan doping dapat merusak prinsip kejujuran dan keadilan olahraga, yang mana atlet pengguna doping bisa lebih kuat sehingga menguntungkan penggunanya dan merugikan atlet non-pengguna doping.

WADA kemudian menyusun World Anti Doping Code (WADC) sebagai kode etik anti-doping yang mengikat seluruh penandatanganan. WADC berisi kerangka kerja dalam rangka harmonisasi kebijakan dan peraturan anti doping di dalam organisasi internasional di bidang olahraga (Casini, 2009, hlm. 11). WADC selalu diperbaharui setiap tahun, dengan

pembaharuan terakhir di tahun 2021. WADC mengatur definisi doping, material terlarang yang dianggap sebagai doping, serta sanksi yang dijatuhkan akibat penggunaannya. Sanksi dalam WADC mengatur atlet, tim, dan federasi olahraga. Dalam pasal 10 WADC (2021) disebutkan bahwa atlet yang terbukti menggunakan doping dapat dijatuhkan sanksi berupa tidak dapat mengikuti aktivitas olahraga mulai dari 2 (dua) hingga 4 (empat) tahun. Adapun jika suatu tim tidak mampu memenuhi ketentuan WADC, federasi olahraga yang berada di wilayah hukum tim tersebut dapat menjatuhkan sanksi berupa pengurangan poin, diskualifikasi, atau sanksi lain sebagaimana tertuang dalam WADC pasal 11. Sedangkan, bagi federasi olahraga yang tidak mematuhi ketentuan, akan dijatuhkan sanksi berupa pengecualian dari keorganisasian WADA atau event-event keolahragaan, seperti tertuang pada WADC pasal 12.

Adanya WADC ini membuat WADA mengatur institusi olahraga lain yang menjadi penandatanganan WADC. WADA dapat membuat negara tunduk kepada WADC agar mampu berpartisipasi dalam kompetisi olahraga (Ningsih, 2022, hlm. 137). Selain itu, WADC dapat menjadi landasan bagi lembaga olahraga internasional untuk merancang peraturan anti doping di lingkungan organisasi tersebut. Negara-negara penandatanganan WADC mewakilkannya kepada komite olimpiade, komite paralimpiade, dan organisasi anti doping nasional. Para penandatanganan WADC harus mampu menyusun kebijakan anti-doping selaras dengan WADC. Namun, legitimasi WADA tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan. Semua ini bergantung kepada berbagai faktor seperti kekurangan sumber daya di beberapa negara dan adanya praktik kecurangan berupa produksi *designer drug* (obat-obatan terlarang rancangan sendiri yang menimbulkan efek psikotropik) (Houlihan & Vidar Hanstad, 2019, hlm. 1). Konteks politik juga mempengaruhi legitimasi WADA, seperti nasionalisme, dimaknai dalam keuntungan negara untuk mematuhi WADC serta pertimbangannya bagi *branding* negara (Houlihan & Vidar Hanstad, 2019, hlm. 11).

Terlepas dari adanya ketidakharmonisan antar institusi olahraga, WADA sudah menunjukkan sebagai organisasi regulator anti doping. Kemampuan WADA menerbitkan WADC, mempublikasikan barang-barang terlarang, mengkampanyekan anti-doping, serta memberlakukan akreditasi kepada laboratorium-laboratorium adalah bukti WADA memiliki *power* (Houlihan & Vidar Hanstad, 2019, hlm. 4). *Power* dalam NGO berasal dari itulah yang melahirkan legitimasi WADA dalam sistem olahraga internasional. Legitimasi merupakan faktor kunci dalam pengakuan negara atas institusi. Institusi mendapatkan legitimasi dari masyarakat internasional karena mereka membutuhkan peran institusi yang adil (Boin dkk., 2021). WADA berusaha melindungi nilai sportivitas yang adil dengan menjaga anti doping

yang merupakan salah satu nilai sportivitas dari penyelewengan. Reputasi besar dan legitimasi inilah yang membuat WADA tetap menjadi regulator anti doping yang dipercaya internasional.

Untuk mempertahankan legitimasi tersebut, WADA sebagai institusi harus tetap kuat dan relevan. Arjen Boin (guru besar institusi publik Universitas Leiden, Belanda), Paul 't Hart (guru besar administrasi publik Universitas Utrecht, Belanda), dan Lauren A. Fahy (peneliti administrasi publik Universitas Utrecht) (2021, hlm. 5) mengatakan bahwa cara yang harus dilakukan agar tetap kuat adalah adaptasi. Adaptasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan iklim organisasi dengan lingkungan sekitar dan kemajuan teknologi. WADA memperbarui WADC dan item terlarang setiap tahunnya. Pembaruan WADC dan item-item terlarang tersebut ber Ini menunjukkan bahwa WADA beradaptasi untuk mengikuti perkembangan terkait doping.

Sanksi yang dijatuhkan WADA ini tidak hanya berdampak kepada atlet dan klub olahraga, namun juga kepada negara. Negara, yang diwakili keanggotaannya oleh komite olimpiade dan lembaga anti doping, dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Sebagai contoh, WADA telah menjatuhkan sanksi kepada Indonesia atas ketidakpatuhan kepada *Test Doping Plan* pada tahun 2021. Sanksi tersebut berupa dengan melarang perwakilan Indonesia untuk menduduki jabatan apapun di dalam WADA, perwakilan Indonesia juga tidak mampu menduduki posisi anggota dewan atau komite organisasi olahraga anggota WADA, melarang pengibaran bendera Merah Putih, dan menghentikan pendanaan kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) (WADA, 2021). Sanksi tersebut merugikan Indonesia, selain karena tidak mampu mengibarkan bendera Merah Putih di event olahraga internasional, Indonesia terancam tidak bisa menjadi tuan rumah internasional. Sanksi tersebut membuat Indonesia terkucilkan dari komersialisasi olahraga serta memberikan persepsi negatif kepada negara (Ningsih, 2022, hlm. 138).

Jika mengacu kepada identifikasi sektor swasta menurut Rodney Bruce Hall (pakar hubungan internasional dan profesor di Universitas Makau) dan Thomas J. Biersteker (pakar hubungan internasional dan profesor di *Graduate Institute of International and Development Studies*, Swiss), WADA dapat dimasukkan sebagai sektor privat. Hal ini karena aktivitas mereka untuk memerangi doping dalam olahraga serta membentuk standar dan norma untuk melawan praktik doping. WADC pun menjadi institusi internasional yang dihormati dalam penegakan sportivitas dalam olahraga. Akan tetapi, Casini (2009, hlm. 3) dan van Bottenburg dkk. (2021, hlm. 201) berpendapat bahwa WADA merupakan organisasi hybrid, kombinasi antara sektor privat dan publik. Hal ini terlihat dari keterlibatan pejabat publik dalam struktur organisasi

WADA. Keterlibatan sektor publik dalam WADA terlihat dalam bagaimana perwakilan negara-negara terlibat dalam legislasi WADC, mulai dari konsultasi hingga keputusan akhir dalam Konferensi Internasional Anti-Doping (Casini, 2009, hlm. 15). Seluruh anggota WADA dapat memberikan suara terkait persetujuan WADC, hingga mencapai $\frac{2}{3}$ suara supaya WADC dapat disahkan (van Bottenburg dkk., 2021, hlm. 192). WADA memiliki kantor-kantor perwakilan regional, yang berguna untuk memperkuat legitimasi WADA di kawasan tersebut (van Bottenburg dkk., 2021, hlm. 193). Hal inilah yang membuat WADA menjadi institusi yang unik.

2.4. Negara dan Kebijakan Anti-Doping

Negara dapat menjadikan olahraga sebagai sarana diplomasi untuk menunjukkan *nation branding* hingga superioritasnya di dunia global (Ningsih, 2022, hlm. 137). Diplomasi tersebut dimulai dari negara mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi olahraga, menjadi tuan rumah, atau melalui hak siar. Pemerintah terkadang tak segan-segan menggelontorkan uang banyak untuk memfasilitasi pengembangan olahraga negara.

Negara mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi olahraga tidak hanya untuk mewartakan bakat atlet, namun juga untuk meningkatkan pamor negaranya. Sebagai contoh, negara-negara Afrika pada tahun 1960-an yang menggunakan olahraga sebagai alat untuk meningkatkan citra negara. Hal ini dikarenakan sumber daya alam negara-negara Afrika sudah dikeruk oleh kolonial Eropa sehingga tidak punya *power* yang dapat dijadikan daya tawar (Allison & Monnington, 2005, hlm. 17). Sebagai gantinya, para pemimpin negara Afrika menjadikan olahraga sebagai alat diplomasi dengan membangun sarana dan sistem ala Barat. Mereka mendirikan institusi-institusi olahraga dan membangun berbagai fasilitas olahraga.

Indonesia juga turut serta mengambil keuntungan dari penyelenggaraan Asian Games tahun 2018. Indonesia berusaha meningkatkan *national branding* dengan cara mengenalkan kebudayaan Indonesia dalam *grand opening* Asian Games. Indonesia dapat disebut melakukan strategi glokalisasi pertandingan olahraga dengan cara melokalkan pementasan olahraga (Ningsih, 2022, hlm. 135). Ningsih mengutip pendapat Giulianiotti dan Brownell bahwa strategi tersebut selain meningkatkan *national branding*, juga dapat menaikkan nilai olahraga karena melibatkan banyak aktor, yakni negara, perusahaan sebagai sponsor, dan NGO dalam olahraga. Menjadi tuan rumah juga adalah ajang bagi negara untuk memamerkan *power*-nya di kancah internasional. Maka, negara pun berlomba-lomba untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah kompetisi olahraga.

Negara akan dianggap tidak mampu menjalankan standar yang ditetapkan oleh institusi olahraga internasional atau melanggar norma olahraga. Anti doping yang merupakan salah satu norma dalam olahraga menjadi seperti harga mati bagi WADA. Negara yang tidak mampu memenuhi ketentuan WADA, akan mendapatkan sanksi berupa larangan untuk berpartisipasi dalam agenda yang diselenggarakan oleh WADA, tidak terpilihnya perwakilan negara tersebut dalam kepengurusan WADA, dan pembatalan pendanaan dari WADA sebagaimana tertuang dalam WADC Pasal 24 (World Anti-Doping Code, 2021).

Apabila negara tersebut terlibat dalam doping, maka *national branding* negara dapat rusak. Konsekuensi minimal bagi negara adalah tidak dikibarkannya bendera negara di dalam event olahraga selama periode tertentu. Selain itu, negara dapat kehilangan sponsor akibat dilarangnya suatu negara mengikuti kompetisi olahraga. Hal ini tentu berdampak negatif kepada pemasukan bagi pengembangan infrastruktur dan operasional olahraga di negara tersebut.

2.5. Norma Anti Doping dalam Formula 1

Formula 1 (F1) merupakan ajang balap mobil internasional paling prestisius. Banyak perusahaan mobil ternama untuk memperlombakan mesin teknologi tingginya di ajang ini. Perusahaan juga tertarik untuk menjadi sponsor F1. Tidak hanya itu, negara-negara berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur seperti sirkuit agar bisa menyelenggarakan F1. Apalagi, F1 terus berekspansi dengan menambah jumlah Grand Prix (bagian dari seri balapan) dari 21 seri di 2016 hingga 24 seri di 2023 (Formula 1, 2022b).

F1 sendiri menjadi kompetisi resmi FIA selaku induk asosiasi balap mobil internasional. FIA mengeluarkan kebijakan anti-doping berdasarkan WADC sebagai standar internasional yang berlaku di dalam WADA (Appendix A to the International Sporting Code-- FIA Anti-Doping Regulations, 2021). Dalam peraturan tersebut, FIA mengeluarkan daftar item terlarang yang termasuk dalam doping sekurang-kurangnya 3 bulan setelah WADA mengeluarkan daftar item terlarang, tertuang dalam pasal 4. FIA memberlakukan sanksi kepada individu yang terbukti melakukan doping berupa diskualifikasi, denda, dan pengurangan poin, tergantung kapan kasus doping tersebut dibuktikan. Sanksi terberat menurut pasal 9 peraturan tersebut apabila pembalap terbukti mempraktikkan doping selama masa balapan adalah diskualifikasi secara otomatis didiskualifikasi. Sedangkan, tim akan menerima *target testing* kepada seluruh anggota tim (Lampiran A pasal 11), dengan konsekuensi diskualifikasi.

F1 sendiri terhitung bersih dari kasus doping oleh pembalap atau tim. F1 tidak pernah mengalami skandal doping seperti kompetisi lainnya. Menurut Jean-Charles Piette, anggota delegasi medis FIA, tidak adanya kasus doping di F1 adalah karena kesadaran pembalap akan resiko doping bagi kesehatan (Motorsport.com, 2016). Ia menambahkan, bahwa pembalap yang memakai doping akan beresiko kepada pembalap sendiri, rekan sesama pembalap, penonton, dan *marshal* (petugas pengaman sirkuit). Apabila pembalap terjatuh atau pingsan akibat doping, ia dapat mencelakakan orang-orang sekelilingnya. Kendati demikian, terdapat pengecualian apabila pembalap berada di luar kompetisi. Pembalap diizinkan untuk mengkonsumsi obat-obatan legal untuk meningkatkan fisik. Ada pula pembalap yang mengkonsumsi Tacrine yang legal untuk mencegah Alzheimer sehingga mampu mengingat konfigurasi sirkuit dengan cepat (Motorsport.com, 2016). Hanya terdapat dua kasus pembalap yang gagal tes doping, itu pun melibatkan mantan pembalap F1 yang hendak terjun ke ajang kelas balap mobil lain. Tomas Enge, mantan pembalap F1 asal Republik Ceko, dijatuhkan sanksi ketika akan membalap di Formula 3000, kelas balap Formula yang lebih rendah dari F1, pada tahun 2002 (BBC Sport, 2002). Selain Enge, Franck Montagny, mantan pembalap F1 asal Prancis, juga dilarang tampil selama 2 tahun oleh FIA akibat penggunaan kokain pada 2015, ketika hendak tampil di ajang Formula E (balap mobil listrik) (FOX Sports, 2015).

Untuk menanggulangi hal tersebut terjadi di F1, F1 pun tetap menaati standar doping dengan melakukan tes meskipun selama ini bebas dari kasus doping. Tes wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Lampiran A FIA Anti-Doping Regulations (2021). Tes doping dapat dilakukan setelah finish di *paddock* atau sewaktu-waktu. Akan tetapi, terdapat beberapa kritik terkait penyelenggaraan tes doping di F1. Pada tahun 2012, Mark Weber, pembalap F1 peraih 9 kali menang Grand Prix dari Australia, mendorong agar F1 melakukan tes doping secara rutin (news.com.au, 2012). Selain itu, terdapat pula tuduhan kepada FIA karena melakukan tes doping untuk mencari-cari kesalahan pembalap tertentu. Contohnya, setelah GP Spanyol tahun 2022, warganet, khususnya fans Lewis Hamilton (juara dunia F1 7x asal Inggris) menuduh FIA melakukan tes doping kepadanya untuk mencari-cari indikasi penggunaan doping setelah penampilannya yang impresif di GP Spanyol tahun 2022 (The SportsRush, 2022).

Adanya tes doping ini merupakan kebijakan yang diambil F1 untuk mempertahankan reputasi mereka. Terlebih, F1 modern melakukan ekspansi besar-besaran semenjak Liberty Media mengambil alih kepemilikan saham Formula One Group pada 2016 (CNN Indonesia, 2016). Liberty Media pun berhak atas promosi dan distribusi hak siar F1. Salah satu program Formula One Group di bawah Liberty Media adalah ekspansi penyelenggaraan Grand Prix. Sejauh ini,

F1 telah berekspansi ke benua Amerika dengan menambah balapan di benua Amerika, mulai dari GP Amerika Serikat (AS) di Circuit of The Americas (COTA), GP Brazil, dan GP Meksiko, F1 menambah sirkuit temporer di stadion Hard Rock, Miami pada 2022 dan sirkuit jalanan di Las Vegas, Nevada tahun 2023 (Formula 1, 2022a). Selain itu, F1 mengalami peningkatan penonton yang hadir di sirkuit, pada 2022 tercatat ada 5.305.807 yang hadir ke sirkuit (F1Destinations.com, 2022). Hal ini menunjukkan peningkatan fans yang pesat. Peningkatan tersebut tentu hendak dijaga oleh F1 dengan komitmen kepada norma doping yang berlaku.

2.6. Skandal Doping Rusia dan Sanksi WADA

WADA mengeluarkan keterangan pers pada tanggal 9 Desember 2019. Dalam keterangan pers tersebut, mereka menjatuhkan sanksi kepada Rusia, yang diwakili oleh Russian Anti-Doping Agency (Rusada), atas ketidakpatuhan terhadap WADC (WADA, 2019). Sanksi tersebut berupa larangan untuk mengikuti Olimpiade dan Paralimpiade selama 4 (empat) tahun. Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari *the Compliance Review Committee* (CRC) yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2019.

Dalam rekomendasi tersebut, CRC mengungkapkan adanya ketidakpatuhan Rusia dalam mematuhi ketentuan WADA. Hal tersebut dibuktikan dari: (1) bahwa data yang diminta oleh WADA dari Rusia untuk memperbaiki tuduhan doping Rusia, berisi *database* laboratorium dan sampel urine (disebut juga *The Moscow Data*), tidak lengkap; (2) beberapa data yang menunjukkan kasus positif doping di 2019 dari *database* dihapus, sebagaimana data yang dihapus pada 2016 dan 2017 sebagai alat bukti banding atas Laporan McLaren sebelumnya (WADA Compliance Review Committee, 2019). Selain itu, terdapat upaya manipulasi oleh staf laboratorium Rusada dengan menambahkan bukti palsu ke dalam *database* tersebut. CRC kemudian merekomendasikan Exco WADA untuk menjatuhkan sanksi larangan berpartisipasi dalam Olimpiade dan Paralimpiade dan perwakilan Rusia tidak diperbolehkan menjabat anggota dewan atau komite dari federasi penandatangan WADA selama 4 (empat) tahun.

Rusia termasuk negara yang sering terkena skandal doping. Hal ini bermula sejak 2014 ketika ARD, salah satu media Jerman, mengeluarkan dokumenter yang menyebutkan bahwa mayoritas atlet Rusia menggunakan doping selama Olimpiade (The Guardian, 2014). Hal ini kemudian mendapatkan respon dari WADA. WADA segera membentuk tim independen untuk menginvestigasi kasus tersebut. Hasilnya, WADA menemukan dugaan bahwa Rusia telah memanipulasi investigasi dengan adanya data yang rusak dari laporan Rusia kepada

International Amateur Athletic Federation (IAAF) (Duval, 2017, hlm. 178). Selanjutnya, WADA menunjuk Richard McLaren, pakar hukum olahraga asal Kanada, sebagai investigator independen untuk menginvestigasi tuduhan doping kepada Rusia sejak 2014. McLaren kemudian menerbitkan laporan yang disebut *McLaren Report* dalam dua edisi, yakni Juli 2016 dan Desember 2016. McLaren (2016) melaporkan dalam laporan pertamanya bahwa ada beberapa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia, yakni:

- (1) Laboratorium Moscow dioperasikan dalam kontrol negara dengan melindungi atlet terkonfirmasi doping;
- (2) Laboratorium Sochi menukarkan beberapa sampel untuk meloloskan atlet untuk berkompetisi;
- (3) Kementerian Olahraga Rusia mengarahkan, mengontrol, dan mengawasi praktik manipulasi oleh laboratorium dengan bantuan Dewan Keamanan Federal Rusia (FSB) dan *the Centre for Sport Preparation (CSP)*;
- (4) Negara mengontrol dan mengawasi Laboratorium Moscow secara langsung dalam operasional sistem anti-doping, serta mewajibkan personel laboratorium untuk bertindak sesuai arahan negara untuk meloloskan atlet;
- (5) negara terlibat langsung dalam manipulasi Laboratorium Sochi dengan menukarkan sampel serta memanipulasi laporan menggunakan alat yang sudah dibuang;
- (6) Kementerian Olahraga mempertimbangkan beberapa atlet yang harus diloloskan dalam tes;
- (7) Metode FSB dalam membuka botol sampel dari Sochi tidak diketahui pasti. Sedangkan, laporan kedua berisi bukti-bukti terkait temuan dalam laporan pertama.

Setelah sanksi 2019, Rusia mengajukan banding kepada CAS atas sanksi kepada WADA. Menurut Rusia, sanksi yang dijatuhkan kepada mereka tidak adil, termasuk larangan bagi mereka untuk bertanding di Olimpiade 2020 di Jepang (The Japan Times, 2019). Menurut Japan Times, CAS akan mengeluarkan keputusan akhir pada Maret atau April 2020. Namun, CAS baru memutuskan hasil arbitrase antara Rusia dan WADA di Desember 2020 setelah WADA mengambil langkah arbitrase di CAS pada Januari 2020 (Court of Arbitration for Sport (CAS), 2020). Hasilnya, CAS memutuskan untuk mengurangi masa larangan tersebut menjadi 2 tahun, mewajibkan Rusia membayar biaya kontribusi sebesar US\$ 1.270.000 dan denda

Otoritas Privat WADA Dalam Sanksi Kepada Rusia dan Dampaknya bagi Formula 1 di Rusia sebesar US\$100.000 kepada WADA, dan memperbaiki hasil laporan-laporan dan investigasi lalu menyerahkannya kembali kepada WADA.

Sanksi WADA kepada Rusia merupakan bentuk kekuatan WADA berupa kemampuan mereka dalam menegakkan norma anti-doping kepada institusi negara. WADA sebagai otoritas privat mampu menegakkan konsekuensi hukum atas pelanggaran atas WADC, sebagai regulasi yang telah ditaati bersama. Sebagai sektor privat, mereka telah menjalankan aktivitas yang tidak hanya mengangkat kepentingan mereka, namun juga mengusung isu yang menjadi kebaikan bersama (Lipschutz & Fogel, 2002, hlm. 136), yaitu perang melawan doping. Untuk mencapai kebaikan bersama tersebut, Ronnie D. Lipschutz, Profesor Emeritus dari Universitas California-Santa Cruz dan Cathleen Fogel (2002) menjelaskan bahwa perlu dibuat peraturan untuk stabilitas dan kredibilitas di dalam sistem.

Adanya sanksi tersebut juga menjadi pelajaran bahwa tata kelola olahraga adalah persoalan kompleks. WADA merupakan salah satu di antara sekian banyak organisasi olahraga internasional. Tata kelola olahraga internasional menurut Spencer Harris (guru besar manajemen olahraga Universitas Colorado), Matthew Dowling (dosen manajemen olahraga Universitas Anglia Ruskin, Inggris), dan Barrie Houlihan (guru besar kebijakan olahraga Universitas Loughborough, Inggris) (2021, hlm. 7) merefleksikan sistem tata kelola polisentris antara instansi sub-nasional, nasional, regional, dan internasional. Masing-masing instansi memiliki regulasi tersendiri sehingga menjadi tantangan bagi WADA untuk mengambil keputusan. Bentuk organisasi WADA yang hybrid juga menimbulkan tantangan atas transparansi dan demokrasinya. WADA menjadi rawan atas konflik kepentingan karena adanya perebutan pengaruh antara otoritas olahraga yang bersifat swasta *versus* otoritas publik (van Bottenburg dkk., 2021, hlm. 201).

Maarten Van Bottenburg, guru besar manajemen olahraga dari Universitas Utrecht (2021, hlm. 206) juga mengatakan bahwa skandal doping ini merupakan ujian bagi WADA, namun dapat membantu menembangkan institusi selama WADA mau bekerjasama dengan negara dan instansi lain serta tidak ada tekanan dari pihak lain yang hendak menutupi kasus mereka. Memang, terdapat beberapa kritik atas tindakan WADA selama menjalankan kekuatannya sebagai otoritas olahraga swasta, seperti Harris, dkk. (2021, hlm. 15) yang mengkritisi posisi lemahnya WADA secara struktur dan politik dalam bertindak dan berdiplomasi, atau van Bottenburg dkk., (2021, hlm. 204) yang mengkritik WADA terlalu kaku dalam melaksanakan prinsip anti doping, tidak mau mendengarkan aspirasi atlet, proses pengambilan keputusan

yang berbelit, dan proses penanganan sanksi kepada Rusia yang tarik-ulur. Namun, kritik tersebut tidak mengarah kepada pembubaran WADA, justru semakin menguatkan posisi WADA sebagai otoritas olahraga anti-doping dan meningkatkan kredibilitas dan legitimasi mereka.

2.7. Dampak Sanksi WADA terhadap F1 di Rusia

F1 merupakan olahraga balap mobil yang berada dalam afiliasi FIA. FIA yang merupakan salah satu penandatanganan WADC tentu mematuhi setiap ketentuan anti doping. Kebijakan yang telah diterapkan oleh FIA adalah harmonisasi kebijakan anti-doping sesuai dengan WADC. FIA juga berfokus kepada pencegahan dan edukasi anti-doping (Appendix A to the International Sporting Code-- FIA Anti-Doping Regulations, 2021). Edukasi yang dicanangkan oleh FIA menyentuh seluruh kompetisi yang berada di bawah naungan FIA, termasuk F1.

Selain harmonisasi dan edukasi, bentuk ketaatan FIA kepada norma anti-doping yang dicanangkan WADA adalah kepatuhan kepada keputusan WADA. Ini tertulis dalam Lampiran A dari *the International Sporting Code* pasal 15, yang menyatakan bahwa setiap keputusan pelanggaran aturan anti-doping yang dibuat oleh Organisasi Anti-Doping, lembaga banding, atau CAS, harus secara otomatis mengikat FIA dan asosiasi balap nasional di luar hukum setelah dikeluarkannya pemberitahuan. Ini berarti keputusan CAS atas sanksi Rusia juga mengikat FIA selaku penandatanganan dan RAF selaku organisasi induk otomotif Rusia.

Konsekuensi atas keputusan tersebut berdampak kepada penyelenggaraan GP Rusia dan partisipasi pembalap Rusia di ajang Formula 1. Penyelenggaraan GP Rusia jika mengacu kepada keputusan CAS (2020), seharusnya tidak boleh mengadakan agenda olahraga selama 2 (dua) tahun. Namun, penyelenggara tetap mengadakan GP Rusia berdasarkan kontrak antara penyelenggara dengan pihak F1 sampai 2025 (Motorsport.com, 2019). Sebagai gantinya, GP Rusia tahun 2021, setahun setelah keputusan CAS, tetap diselenggarakan tanpa bendera Rusia dan lagu kebangsaan Rusia tidak diperdengarkan dalam seremoni pembukaan GP Rusia (Motorsport.com, 2019).

Sanksi WADA kepada Rusia juga berdampak pada pembalap. Sesuai dengan keputusan CAS (2020), atlet Rusia tidak diperkenankan untuk menggunakan seragam dengan yang mengandung unsur bendera Rusia atau menunjukkan bendera, nama negara, atau simbol negara Rusia di pakaian, perlengkapan, barang pribadi atau tempat-tempat yang mampu dilihat secara publik. Maka, RAF menyatakan bahwa semua pembalap yang berkompetisi dalam perlombaan

Otoritas Privat WADA Dalam Sanksi Kepada Rusia dan Dampaknya bagi Formula 1 di Rusia

FIA, termasuk F1, tidak menunjukkan bendera dan simbol Rusia dalam perlengkapan olahraga mereka (RaceFans, 2021).

Pada musim 2021, terdapat seorang pembalap Rusia yang berpartisipasi dalam F1, yaitu Nikita Mazepin. Ia membalap bersama tim Haas asal AS dengan kontrak *multi-year* (Haas F1 Team, 2020). Mazepin juga membawa sponsor Uralkali, perusahaan produsen pupuk asal Rusia, milik ayahnya (ESPN, 2020). Uralkali mensponsori tim Haas selama 2021 dan menjadi sponsor utama untuk musim tersebut (Haas F1 Team, 2021). Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari sanksi yang diterima negaranya, Mazepin membalap sebagai atlet netral, alih-alih sebagai atlet dari Rusia. Dokumen resmi F1 pada tahun 2021 menampilkan kebangsaan Mazepin dengan inisial “RAF” (*Russian Automobile Federation*) dan bendera putih bergambar logo RAF, seperti tertulis dalam *Entry List* (daftar peserta F1).

Kedatangan sponsor Rusia di tim Haas juga menimbulkan masalah bagi tim tersebut. Haas menampilkan *livery* warna putih dengan corak warna bendera Rusia (Haas F1 Team, 2021). Penggunaan *livery* tersebut mengundang perhatian WADA karena bendera Rusia dilarang untuk ditunjukkan dalam bentuk apapun. FIA kemudian menanggapi reaksi WADA tersebut dengan pernyataan bahwa tim telah mengklarifikasi *livery* tersebut kepada FIA. “Jelas kita tidak dapat menggunakan bendera Rusia sebagai bendera Rusia, tetapi Anda dapat menggunakan warna pada mobil,” kata Guenther Steiner, kepala tim Haas dikutip dari Autosport (2021). WADA kemudian menginvestigasi pemilihan corak oleh Haas dan mengambil tindakan atas penggunaan *livery* tersebut, sebagaimana diberitakan oleh Formula1news.co.uk (2021a). Kemudian, pada 16 Maret 2021, WADA mengumumkan bahwa mereka tidak akan menindak Haas terkait legalitas *livery* yang digunakan (Formula1news.co.uk, 2021b).

Sanksi WADA pun juga mengikat seluruh anggotanya, termasuk FIA. Hal ini secara jelas dapat terlihat bagaimana FIA menghapus nama, bendera, dan identitas apapun terkait nama Rusia di dalam penyelenggaraan GP Rusia. Akan tetapi, F1 tidak mengganti nama resmi GP Rusia pada tahun 2021, hanya menghilangkan unsur bendera dan tidak memperdengarkan lagu kebangsaan Rusia dalam upacara pembukaan GP Rusia 2021. Investigasi WADA terhadap *livery* tim Haas juga tidak menjadi perhatian khusus oleh WADA, karena penggunaan warna tim merupakan domain FIA, jika merujuk pada pernyataannya dalam merespon investigasi WADA. Hal tersebut, sekali lagi menjadi tantangan bagi WADA bagaimana harmonisasi kebijakan tersebut diterapkan di setiap anggotanya.

3. Kesimpulan

WADA sebagai institusi olahraga telah menjalankan perannya sebagai otoritas yang dapat mengatur bagaimana nilai anti-doping diberlakukan secara internasional. WADC sebagai produk regulasi WADA telah menjadi norma bersama. Jika meninjau kepada peran otoritas swasta, WADA dapat menjadi contoh bagaimana sektor privat menjalankan perannya sebagai pembentuk standar dan peraturan.

Sanksi kepada Rusia adalah salah satu contoh dari bagaimana WADA mengimplementasikan perannya dalam menegakkan program anti-doping. Terlepas dari proses banding oleh Rusia kepada CAS dan keputusan akhir CAS yang mengurangi masa berlakunya larangan dari 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun, itu sudah menunjukkan kekuatan WADA yang terletak dalam performanya.

Sanksi tersebut kemudian dapat mengikat seluruh anggotanya, termasuk FIA. FIA, yang menaungi balap mobil F1 pun mengikuti keputusan CAS atas sanksi WADA tersebut dengan menghilangkan bendera Rusia dari dokumen-dokumen selama keputusan tersebut efektif. Akan tetapi, WADA tetap mendapatkan kritik dan tantangan, mulai dari demokrasi, transparansi, dan penanganan yang tanggap terhadap implementasi sanksi, salah satu contohnya adalah penggunaan unsur warna bendera Rusia dalam *livery* salah satu tim balap. Namun, terlepas dari kritikan tersebut, WADA merupakan organisasi besar yang mendapatkan legitimasi secara internasional sebagai penjaga norma anti-doping dalam olahraga.

Daftar Pustaka

Buku

- Allison, L., & Monnington, T. (2005). Sport, prestige and international relations. Dalam L. Allison (Ed.), *The Global Politics of Sport: The role of global institutions in sport* (hlm. 5–23). Routledge.
- Boin, A., Fahy, L. A., & 't Hart, P. (2021). Guardians of Public Value: How Public Organizations Become and Remain Institutions. Dalam A. Boin, L. A. Fahy, & P. 't Hart (Ed.), *Guardians of Public Value: How Public Organizations Become and Remain Institutions*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-51701-4>
- Hall, R. B., & Biersteker, T. J. (2002). The emergence of private authority in the international system. Dalam R. B. Hall & T. J. Biersteker (Ed.), *The Emergence of Private Authority in Global Governance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491238>

- Houlihan, B., & Vidar Hanstad, D. (2019). The effectiveness of the World Anti-Doping Agency: developing a framework for analysis. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(2), 203–217. <https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1534257>
- Lipschutz, R. D., & Fogel, C. (2002). “Regulation for the rest of us?” Global civil society and the privatization of transnational regulation. Dalam R. B. Hall & T. J. Biersteker (Ed.), *The Emergence of Private Authority in Global Governance* (hlm. 115–140). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491238>
- Murray, S. (2018). *Sports Diplomacy: Origins, Theory and Practice* (1 ed.). Routledge.
- van Bottenburg, M., Geeraert, A., & de Hon, O. (2021). The World Anti-Doping Agency: Guardian of Elite Sport’s Credibility. Dalam A. Boin, L. A. Fahy, & P. ‘t Hart (Ed.), *Guardians of Public Value How Public Organisations Become and Remain Institutions*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-51701-4>

Artikel Jurnal

- Casini, L. (2009). Global Hybrid Public-Private Bodies: The World Anti-Doping Agency (Wada). *International Organizations Law Review*. <http://ssrn.com/abstract=1520751>
- Chatzigianni, E. (2017). Global sport governance: globalizing the globalized. *Sport in Society*, 21(9), 1454–1482. <https://doi.org/10.1080/17430437.2017.1390566>
- Duval, A. (2017). The Russian doping scandal at the court of arbitration for sport: lessons for the world anti-doping system. *The International Sports Law Journal*, 16(3–4), 177–197. <https://doi.org/10.1007/s40318-017-0107-6>
- Fan, Y. (2006). Branding the nation: What is being branded? *Journal of Vacation Marketing*, 12(1), 5–14. <https://doi.org/10.1177/1356766706056633>
- Harris, S., Dowling, M., & Houlihan, B. (2021). An analysis of governance failure and power dynamics in international sport: the Russian doping scandal. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 13(3), 359–378. <https://doi.org/10.1080/19406940.2021.1898443>
- Kobierecki, M. M., & Strožek, P. (2017). Sport as a Factor of Nation Branding: A Quantitative Approach. *The International Journal of the History of Sport*, 34(7–8), 697–712. <https://doi.org/10.1080/09523367.2017.1403901>
- Murray, S., & Pigman, G. A. (2014). Mapping the relationship between international sport and diplomacy. *Sport in Society*, 17(9), 1098–1118. <https://doi.org/10.1080/17430437.2013.856616>
- Ningsih, S. (2022). Sektor Privat sebagai Otoritas Moral Alasan dibalik Kepatuhan PBSI terhadap Peraturan Anti – Doping WADA. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 130–147. <https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.33766>
- van Kleef, R. (2013). The legal status of disciplinary regulations in sport. *The International Sports Law Journal*. <https://doi.org/10.1007/s40318-013-0035-z>

Working Paper

Szondi, G. (2008). *Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences*.

Situs Web

- Autosport.com. (2021, Mei 3). *WADA looking into Haas F1 livery after Russian flag ban*. Autosport.com. <https://www.autosport.com/f1/news/wada-looking-into-haas-f1-livery-after-russian-flag-ban/5589751/>
- BBC Sport. (2002, September 13). *Enge fails drug test*. BBC Sport. <http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/motorsport/2253687.stm>
- CNN Indonesia. (2016, September 8). *Akuisisi Formula 1, Transaksi Terbesar di Dunia Olahraga*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20160908131519-163-156997/akuisisi-formula-1-transaksi-terbesar-di-dunia-olahraga>
- ESPN. (2020, November 30). *Who is Nikita Mazepin and why did he get the 2021 Haas drive?* ESPN. https://www.espn.com/f1/story/_/id/30421021/who-nikita-mazepin-why-did-get-2021-haas-drive
- F1Destinations.com. (2022, November 23). *Formula 1 Attendance Exceeds 5 million in 2022*. F1Destinations.com. <https://f1destinations.com/formula-1-attendance-exceeds-5-million-in-2022/>
- Formula 1. (2022a, Maret 31). *Las Vegas to host Formula 1 night race from 2023*. Formula 1. <https://www.formula1.com/en/latest/article.breaking-las-vegas-to-host-formula-1-night-race-from-2023.69O9nKLwKraqAhR5rr8TQg.html>
- Formula 1. (2022b, September 20). *2023 Formula 1 calendar revealed: F1 announces 24-race calendar for 2023 | Formula 1®*. Formula 1. <https://www.formula1.com/en/latest/article.f1-announces-24-race-calendar-for-2023.7oNRaq4kZ2bwTAmL7r6dqg.html>
- Formula1news.co.uk. (2021a, Maret 15). *WADA Concludes Haas Livery Investigation*. Formula1news.co.uk. <https://formula1news.co.uk/wada-concludes-haas-livery-investigation-source/>
- Formula1news.co.uk. (2021b, Maret 16). *WADA Denies Concluding Investigation Into Legality Of Haas Livery*. Formula1news.co.uk. <https://formula1news.co.uk/wada-denies-concluding-investigation-into-legality-of-haas-livery/>
- FOX Sports. (2015, Maret 30). *Former F1 driver Montagny suspended two years after positive drug test*. FOX Sports. <https://www.foxsports.com/stories/motor/former-f1-driver-montagny-suspended-two-years-after-positive-drug-test>
- Haas F1 Team. (2020, November 30). *Nikita Mazepin to Race for Haas F1 Team*. Haas F1 Team. <https://www.haasf1team.com/news/nikita-mazepin-race-haas-f1-team>
- Haas F1 Team. (2021, Maret 4). *Uralkali Announced as Haas F1 Team Title Partner*. Haas F1 Team. <https://www.haasf1team.com/news/uralkali-announced-haas-f1-team-title-partner>
- Motorsport.com. (2016, Januari 9). *Analysis: Why F1 doesn't have doping scandals*. Motorsport.com. <https://www.motorsport.com/f1/news/analysis-why-f1-doesn-t-have-doping-scandals-666534/666534/>

- Motorsport.com. (2019, Desember 9). *Russia GP chiefs confident sporting ban will not impact F1 race*. Motorsport.com. <https://www.motorsport.com/f1/news/russian-gp-wada-global-ban/4608557/>
- news.com.au. (2012, November 2). *Mark Webber calls for F1 drug tests after Moto2 drug incident*. news.com.au. <https://www.news.com.au/sport/motorsport/mark-webber-calls-for-f1-drug-tests-after-moto2-rider-anthony-west-tests-positive/news-story/9632a120746c990edce17e28a700fee5>
- RaceFans. (2021, Februari 5). *Mazepin and other Russian drivers forbidden from racing under country's flag*. RaceFans.net. <https://www.racefans.net/2021/02/05/mazepin-and-other-russian-drivers-forbidden-from-racing-under-countrys-flag/>
- The Guardian. (2014, Desember 3). *Russia accused of athletics doping cover-up on German TV*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/sport/2014/dec/03/russia-accused-athletics-doping-cover-up-olympics>
- The Japan Times. (2019, Desember 19). *Russia appeals four-year doping ban*. The Japan Times. <https://www.japantimes.co.jp/sports/2019/12/19/olympics/russia-appeals-four-year-doping-ban/>
- The SportsRush. (2022, Mei 22). *"No surprise, he was driving like a man who was possessed"- Lewis Hamilton fans blast the FIA for testing him for drugs after the Spanish GP - The SportsRush*. The SportsRush. <https://thesportsrush.com/f1-news-no-surprise-he-was-driving-like-a-man-who-was-possessed-lewis-hamilton-fans-blast-the-fia-for-testing-him-for-drugs-after-the-spanish-gp/>
- WADA. (t.t.-a). *Code Signatories | World Anti Doping Agency*. Diambil 1 September 2023, dari <https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/world-anti-doping-code/code-signatories>
- WADA. (t.t.-b). *Governance | World Anti Doping Agency*. WADA. Diambil 6 September 2023, dari <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance>
- WADA. (t.t.-c). *Who We Are | World Anti Doping Agency*. WADA. Diambil 6 September 2023, dari <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are>
- WADA. (2019, Desember 9). *WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency | World Anti Doping Agency*. WADA. <https://www.wada-ama.org/en/news/wada-executive-committee-unanimously-endorses-four-year-period-non-compliance-russian-anti>
- WADA. (2021, Oktober 7). *WADA confirms non-compliance of five Anti-Doping Organizations | World Anti Doping Agency*. WADA. <https://www.wada-ama.org/en/news/wada-confirms-non-compliance-five-anti-doping-organizations>

Dokumen Resmi

- Appendix A to the International Sporting Code-- FIA Anti-Doping Regulations, FIA (2021). <https://www.fia.com/international-sporting-calendar>;
- Court of Arbitration for Sport (CAS). (2020). *Anti-Doping | CAS Decision in the Arbitration WADA V. Rusada*. WADA.
- McLaren, R. (2016). *RICHARD H. MCLAREN INDEPENDENT PERSON WADA INVESTIGATION OF SOCHI ALLEGATIONS*.

Constitutive Instrument of Foundation of the Agence Mondiale Antidopage--World Anti-Doping Agency, WADA 1 (2021).

World Anti-Doping Code, (2021).

WADA Compliance Review Committee. (2019). *CRC Recommendation In Relation To Rusada*.